

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah merangkum beberapa review dari penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam memberikan informasi tambahan, daftar bacaan dan pandangan dalam memahami penelitian yang dihadapi.

Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014:5) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di SKPD yang meliputi dinas, badan, dan kantor di Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan menghasilkan, yaitu : pertama kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kedua, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ketiga, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Keempat, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014:11) terletak pada tempat dan waktu penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel bebas.

Devi Rovieyanti (2012:20), meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian Devi Rovieyanti menggunakan teknik survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rovieyanti terletak pada tempat dan waktu penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel bebas, penelitian Rovieyanti menggunakan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat dan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas.

Vicky Agustawan Lasoma (2013:8), meneliti tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Adhi (2013:15) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 49,1%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasona terletak pada tempat dan waktu penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah sebagai variabel bebas, sedangkan Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas.

Angga Dwi Permadi (2013:14), meneliti tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Kota Bandung. Populasi penelitian ini adalah karyawan Dinas Bina Marga Kota Bandung dengan menyebarkan angket. Teknik sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*, sedangkan metode analisis korelasi *rank spearman* dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil penelitian hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan perbandingan t hitung dan t tabel menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi terletak pada tempat dan waktu penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian ini menggunakan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah

penggunaan kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas

Arief (2016:7) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota medan, tetapi penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota medan.

Erlynda Y. Kasim (2015:9), pengaruh kompetensi akuntan pemerintah dan implementasi pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Makalah ini mempelajari masalah yang terjadi dalam pelaporan keuangan lembaga pemerintah. Studi ini menganalisis pengaruh kompetensi akuntan pemerintah dan implementasi pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Fenomena yang terjadi adalah masih banyak akuntan pemerintah yang menyiapkan pelaporan keuangan tanpa memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Demikian juga, masalah pengendalian internal juga diduga mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandung, dan unit analisisnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Dengan sekitar 60 SKPD dan kabupaten di kota Bandung, para peneliti mengambil sampel unit kerja nondistrik (30 SKPD). Metodologi yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi akuntan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengendalian intern juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas Pelaporan Keuangan.

Hari Setiawati (2013:18), Pengaruh Kompetensi Akuntan Internal, Komitmen Manajer terhadap Organisasi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang diambil dari 31 unit pemerintah daerah.

Data sebelum digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu diuji untuk uji validitas dan reliabilitas, dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komitmen Manajer Internal terhadap Organisasi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal, memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan secara bersamaan (2) Kompetensi Akuntan Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (3) Komitmen Manajer terhadap Organisasi tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (4) Implementasi Sistem Pengendalian Internal tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Iskandar Muda dkk (2017:4) pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem akuntansi daerah sebagai intervensi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Ada 108 kuesioner yang dibagikan untuk semua anggota staf. Hipotesis dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM). Hasil dari penelitian ini adalah, secara parsial, kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Kabupaten Labuhanbatu, Indonesia. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penggunaan teknologi informasi yang tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Studi ini merekomendasikan bahwa harus ada program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pimpinan harus mendukung penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih optimal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

PP No 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa:“Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Bastian (2006:297), pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :“Laporan Keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5), menjelaskan bahwa:“Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2006, setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kualitas adalah :“Kualitas adalah tingkat (1) baik buruknya sesuatu atau (2) taraf atau derajat”.

Yadiati (2017:32) kualitas pelaporan keuangan adalah :“Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat

karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: 37) :

- (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- (2) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - b. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - c. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
 - d. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik (Standar Akuntansi pemerintahan: 38) :

- (1) Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujiannya dilakukan lebih

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- (3) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan
Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial atau politik. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua) :

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.2.1.3 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang ketentuan penerapan standar akuntansi pemerintah ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabel
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2.1.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen Laporan Keuangan pokok berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional, yakni laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- 5) Laporan Arus Kas, yakni laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 7) Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Hasil kajian penelitian tentang penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) **Kompetensi Sumber Daya Manusia**
 Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting untuk mewujudkan tujuan dalam sebuah organisasi. Kompetensi sumber daya pegawai penatausaha keuangan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan akuntansi akan memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kade Sinarwati (2015:35) apabila Kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan baik sehingga memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.
- 2) **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**
 Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Vicky Agustiawan Lasoma (2013:28) semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang di sajikan juga berkualitas.
- 3) **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**
 Informasi yang disajikan membutuhkan suatu sistem dalam penyusunannya. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur mulai dari pengumpulan

data, pencatatan, dan pengikhtisaran dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Angga Dwi Permadi (2013:22) semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

2.2.1.6 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator antara lain:

- 1) Relevan.
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi yang relevan bercirikan memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik dan lengkap.
- 2) Andal.
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- 4) Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai.

2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang

berhubungan dengan pekerjaan. McClelland (2011:299) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki oleh seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Sumber daya manusia yaitu manusia atau orang yang berkerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain Nawawi, (2001:57).

Demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 Pasal2 ayat (1) indikator kompetensi sumber daya manusia (pegawai) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
- 2) Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab ide yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- 3) Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

2.2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

2.2.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat(2) yang berbunyi :

“Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual”. “SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP” pada ayat (4) dinyatakan bahwa : “PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan pemerintah ini”.

Lampiran I yang dimaksud adalah SAP Berbasis Akrual yang terdiri atas Kerangka Konseptual dan PSAP Nomor 01 sampai dengan PSAP Nomor 12. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara berharap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

International Monetary Fund (IMF), sebagai lembaga kreditor, menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang didalamnya menyarankan kepada

Negara-negara debitornya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini, karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi, basis akrual menyediakan estimasi yang tepat atas berpengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dapat dicatat, termasuk transaksi internal.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

- 1) Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
- 2) Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
- 3) Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- 4) Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
- 5) Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- 6) Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya kea tau melakukan bisnis dengan entitas
- 7) Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

2.2.3.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan indikator :

- 1) Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

2) Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.

3) Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5) Akuntansi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

6) Akuntansi Investasi.

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut :

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

7) Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan.

8) Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- (3) Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9) Akuntansi Kewajiban.

Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya manusia ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

10) Koreksi kesalahan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Korelasi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11) Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

2.2.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.4.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pramono Hariadi, (2010:115) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses berupa analisis transaksi yang dituangkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan. Mulyadi, (2001:3)

Abdul Halim (2007:42) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditur, Rakyat, Analisis dan Pemerhati Pemda, dan Pemerintah Pusat, Abdul Halim, (2007:42).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), yaitu : “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu.

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari Pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

2.2.4.2 Indikator Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Angga Dwi Permadi (2013:11) indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
- 2) Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Transaksi yang terjadi juga harus disertai bukti transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.
- 3) Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

2.2.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian = Paradigma Penelitian

Penelitian oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014:15) Penelitian tersebut berjudul pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di SKPD yang meliputi dinas, badan dan kantor di Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan menghasilkan, yaitu : pertama kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kedua, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ketiga, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Keempat, Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014) terletak pada tempat dan waktu penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan Kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan dan Sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas.

2.2.6 Pengembangan Hipotesis

- 1) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggung jawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakaian lain. Guna memenuhi tanggung

jawab dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

- 2) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 3) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga mengharapkan bagaimana proses akuntansi itu dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan sistematika sistem akuntansi keuangan daerah sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

- 4) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang telah dilakukan secara sistematis pada suatu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten

dalam bidang akuntansi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga penting dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Pemerintah juga harus menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.7 Hipotesis Penelitian

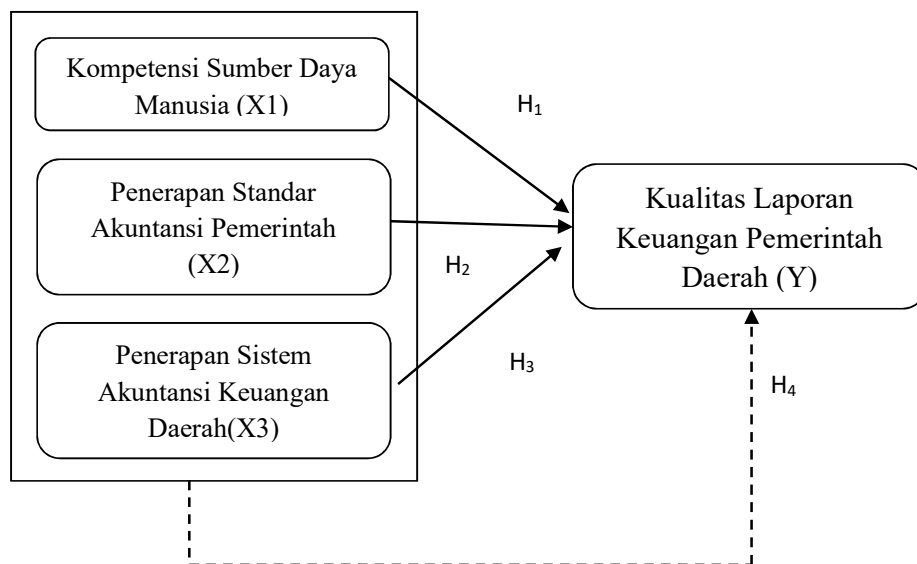
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian atau biasa disebut hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi para peneliti akan membuat hipotesis dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H2 : Terdapat pengaruh positif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H3 : Terdapat pengaruh positif Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H4 : Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dibuat kerangka konseptual penelitian untuk variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

- : Pengaruh untuk masing-masing variabel X (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
- : Pengaruh untuk semua variabel X (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)